



Mahsa Amini, Hijab, and Mass Movements: Reading the Iranian Constitution About Women in Public Spaces

¹Mas'odi, ²Fandi Ahmad

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Indonesia

²University of Marlbourne, Australia

¹Ibnumida03@gmail.com, ²fhaadii@student.unimelb.edu.au

Abstract

Keywords:

*Mahsa Amini,
Mass movements,
Constitution, and
Democratation*

Mahsa Amini's death after being arrested by the moral police provoked mass movements in various cities in Iran. The demonstration was carried out by an anti-government mass to criticize the government which was considered discriminatory. The issues raised in the demonstration were the headscarf, equality, democratization and freedom of expression. Responding to this phenomenon, this research was conducted to examine the mass movement in Iran, the obligatory hijab and its impact on Iranian women's careers, and the Iranian constitution which regulates women in the public sphere. Collecting data in this study using literature study. The results of this study indicate that Iran's democracy guarantees the freedom of the people to express their aspirations in the public sphere. Therefore, demonstrations are an integral part of the Iranian public. Iran's constitution guarantees open access to information and justice for all levels of society. The Iranian constitution also explicitly regulates women's rights. Iranian women have the same rights as men, such as the right to education, economy, culture, to political positions in government.

Abstrak

Kata Kunci:

*Mahsa Amini,
Gerakan Massa,
Konstitusi, dan
Demokrasi*

Kematian Mahsa Amini setelah ditangkap polisi moral memancing gerakan massa di berbagai kota di Iran. Demonstrasi dilakukan massa anti-pemerintah untuk mengkritisi pemerintah yang dianggap diskriminatif. Isu-isu yang diangkat dalam demonstrasi ialah jilbab, kesetaraan, demokratisasi, dan kebebasan berekspresi. Merespon fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk

mengkaji tentang gerakan massa di Iran, kewajiban jibab dan dampaknya terhadap karir perempuan Iran, dan konstitusi Iran yang mengatur perempuan di ruang publik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi Iran menjamin kebebasan rakyat menyampaikan aspirasi di ruang publik. Karena itu, demonstrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari publik Iran. Konstitusi Iran menjamin keterbukaan akses informasi dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Konstitusi Iran juga mengatur secara tegas tentang hak-hak kaum perempuan. Perempuan Iran memiliki hak yang sama seperti laki-laki, seperti hak pendidikan, ekonomi, budaya, hingga jabatan politik di pemerintahan.

Received: 19-01-2023, Revised: 25-02-2023, Accepted: 28-02-2023

© Syura: Journal of Law
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum
Banyuanyar Pamekasan, Indonesia

Doi:



This is an open access article under
licensed [Creative Commons Attribution
NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Gelombang demonstrasi kembali terjadi di berbagai kota di Iran. Pemicunya ialah meninggalnya Mahsa Amini (22), seorang perempuan muda Iran yang berasal dari suku Kurdi, yang sebelumnya ditangkap oleh anggota Polisi Moral atau "Patroli Bimbingan". Penangkapan tersebut dilatarbelakangi cara berjilbab Mahsa Amini yang terlalu longgar dan tidak sesuai dengan aturan berpakaian di Iran. Sebagaimana diketahui bahwa pasca revolusi 1979 Iran membuat aturan khusus tentang cara berpakaian perempuan Iran dan diatur dalam konstitusi negara para Mullah tersebut.

Meninggalnya Mahsa Amini kemudian memancing emosi massa dan memantik serangkaian protes para demonstran yang sebelumnya sudah kerap turun ke jalan akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sejak 2019 silam¹. Demonstrasi terjadi di beberapa kota besar, mulai ibu kota Teheran hingga berbagai wilayah di Iran barat laut dan tengah seperti Tabriz, Arak, dan Isfahan².

Penyebab meninggalnya Mahsa Amini masih menjadi polemik dan memunculkan banyak versi, khususnya di berbagai pemberitaan di media massa. Beberapa media Barat dan juga media Timur Tengah yang kontra dengan pemerintahan Iran satu suara mengambil

¹ Matius Alfons, "Demo Kenaikan Harga BBM Masih Terjadi Di Iran, Pedemo Jarah Toko," *Detik News*, 2019, <https://news.detik.com/internasional/d-4789694/demo-kenaikan-harga-bbm-masih-terjadi-di-iran-pedemo-jarah-toko>.

² Reuters, "Protests Flare across Iran in Violent Unrest over Woman's Death," 2022, <https://www.reuters.com/world/middle-east/tehran-governor-accuses-protesters-attacks-least-22-arrested-2022-09-20/>.

kesimpulan bahwa Mahsa Amini meninggal setelah mendapat penyiksaan dari Polisi Moral. Tidak hanya media-media Barat, berbagai media nasional dalam negeri juga banyak yang berkesimpulan demikian. Di sisi lain, beberapa media memberitakan bahwa meninggalnya Mahsa Amini akibat hipoksia serebral, yang menyebabkan gangguan irama jantung mendadak. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Mohammad Azad, Duta Besar (dubes) Iran di Indonesia³.

Kedubes Iran mengungkapkan bahwa isu meninggalnya Mahsa Amini kemudian menjadi isu liar dan dimanfaatkan oleh Barat khususnya Amerika dan sekutunya Israel untuk mengganggu stabilitas Iran. Presiden Iran, Ibrahim Raisi dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Universitas Teheran mengatakan, bahwa yang diinginkan Amerika di Iran ialah perusakan. Amerika menginginkan Iran menjadi puing kehancuran⁴. Dalam kesempatan tersebut Ibrahim Raisi juga menyampaikan pesan dari Menlu Suriah yang mengatakan bahwa Amerika menggunakan skenario yang sama untuk menghancurkan Iran seperti yang

terjadi di Afghanistan, Libya, dan Suriah.

Dalam berbagai aksi demonstrasi, selain menuntut transparansi kematian Mahsa Amini, para demonstran menuntut lahirnya demokratisasi, kebebasan berekspresi, kesetaraan, hingga penggulingan penguasa Iran. Penguasa Iran dianggap dikatator sehingga harus segera dilengserkan. Tidak hanya diangkat oleh para demonstran, isu tersebut juga muncul dan terus diproduksi oleh para pemimpin negara-negara Barat. Kematian Mahsa Amini oleh Barat dianggap sebagai buah kediktatoran pemimpin Iran. Karena itu Uni Eropa dan Amerika bereaksi keras dengan menjatuhkan sanksi baru untuk Iran, khususnya pada Polisi Moral dan beberapa pejabat Iran⁵.

Amerika dan Uni Eropa sejak lama menyoroti dan memanfaatkan isu jilbab sebagai alat untuk menyerang Iran. Bahwa kewajiban berjilbab bagi perempuan Iran melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM)⁶. Sebab itu, ketika peristiwa meninggalnya Mahsa Amini direspon aksi protes oleh rakyat Iran, Amerika dan Uni Eropa cepat bereaksi dan

³ Novi Chriastuti, "Geger Kematian Mahsa Amini, Ini Kata Kedubes Iran Soal Penyebabnya," *Detik News*, 2022, <https://news.detik.com/internasional/d-6357773/geger-kematian-mahsa-amini-ini-kata-kedubes-iran-soal-penyebabnya>.

⁴ Sahara TV, "Pidato Panas Presiden Iran Di Hadapan Mahasiswa Universitas Teheran," 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=csLqBfjURqc>.

⁵ Berlianto, "Buntut Kematian Mahsa Amini, AS Sanksi Polisi Moral Iran," *Sindonews.Com*,

2022,

<https://international.sindonews.com/read/892877/42/buntut-kematian-mahsa-amini-as-sanksi-polisi-moral-iran-1663898970>.

⁶ Ikhsan Abdul Hakim, "Penasihat Biden: Kami Tak Terkejut Gelombang Kerusakan Melanda Iran, Kebijakannya Tak Sesuai HAM," *Kompas*, 2022, <https://www.kompas.tv/article/330706/pe-nasihat-biden-kami-tak-terkejut-gelombang-kerusakan-melanda-iran-kebijakannya-tak-sesuai-ham>.

memanfaatkan akumulasi kemarahan massa untuk “menggoyang” pemerintahan Iran.

Sebagaimana mafhum, Amerika dan Uni Eropa selalu berlindung di balik jargon demokrasi, universalisme, dan kesetaraan gender sebagai parameter untuk menggulingkan pemerintahan Iran. Namun usaha Amerika lagi-lagi tidak membuahkan hasil karena Amerika gagal mempengaruhi suara mayoritas rakyat Iran. Yang terjadi rakyat Iran melakukan demonstrasi tandingan dengan massa yang lebih besar untuk mendukung pemerintah Iran⁷.

Dalam konteks Iran, atas nama demokrasi Amerika kerap melegalkan dan menseponsori berbagai upaya penggulingan pemerintahan yang sah di berbagai negara. Namun, di saat yang sama tidak jarang pula Amerika menganggangi demokrasi demi mewujudkan hasrat politik dan kepentingan nasionalnya. Misalnya, tahun 1953 melalui operasi Ajax Amerika dan Inggris berhasil melengserkan PM Iran yang berideologi Pan-Arabisme, Muhammad Mosadeq, karena melakukan nasionalisasi minyak Iran dari perusahaan-perusahaan Inggris.

Musadeq yang awalnya sangat dicintai rakyatnya harus lengser karena hasutan dan berita bohong yang disebar oleh CIA. Setelah itu rezim Reza Shah Pahlevi kembali berkuasa di Iran yang sebelumnya kabur dan mengungsi ke Roma. Penguasa otoriter tersebut kembali berkuasa karena mendapat dukungan penuh dari Amerika. Tidak hanya Shah Pahlevi penguasa ototiriter seperti Hosni Mubarak di Mesir, Ben Ali di Tunisia, dan Attaturk di Turki, juga mendapat pernah dukungan dan perlindungan dari Amerika⁸.

Fakta ini menunjukkan absurditas Amerika dalam menjalankan azas demokrasi. Bahwa demokrasi versi Amerika adalah demokrasi yang beririsan dengan kepentingan politik Amerika. Kebijakan luar negeri AS adalah semangat untuk “menerapkan demokrasi di luar negeri sebagai cara untuk menjaga keamanan nasional”⁹. Sebab itu, demokrasi tetap menjadi isu penting yang selalu diangkat dan menjadi daya tawar setiap campurtangan Amerika dalam berbagai konflik dunia, tidak terkecuali di Iran. Amerika hadir di Iran dengan paket demokrasi yang dianggap hilang dari rezim penguasa

⁷ Mahdi Muhammad, “Unjuk Rasa Pro-Pemerintah Tandingi Demonstrasi Dukung Mahsa Amini,” *Kompas*, 2022, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/09/23/teheran-ambigu-hadapi-para-demonstran>.

⁸ Mas’odi, “Epistemologi Falsifikasionisme Popper Dan Mitos Universalisme Barat: Menyoal Proyek Demokratisasi AS Di Dunia Arab,” in *International Confrence on Islamic Studies*, 2022, 243,

<https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/icois/article/view/74>.

⁹ Fawaz A. Gergez, *Amerika Dan Islam Politik: Benturan Peradaban Atau Benturan Kepentingan?*, trans. Kili Pringgodigdo and Hamid Basyaib (Jakarta: AlvaBet, 2002); Mas’odi, “Epistemologi Falsifikasionisme Popper Dan Mitos Universalisme Barat: Menyoal Proyek Demokratisasi AS Di Dunia Arab.”

Iran, khususnya menyangkut kematian Mahsa Amini. Pertanyaannya kemudian, benarkah Pemerintahan Iran tidak demokratis, khususnya terhadap para perempuan Iran? Bagaimana konstitusi Iran mengatur gerak Perempuan Iran di ruang publik? Apakah kebijakan wajib jilbab menghalangi perempuan Iran untuk aktif di ruang publik?

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan di atas penelitian ini dilakukan untuk menggali jawaban tentang demokratisasi di Iran, khususnya terkait konstitusi Iran yang mengatur jilbab dan aktivitas perempuan Iran di ruang publik. Hal ini penting karena arus informasi tentang meninggalnya Mahsa Amini yang sampai di ruang publik mengalami dikotomis, dan melebar ke berbagai isu yang menyebabkan pembelahan di masyarakat. Sebab itu, penelitian ini tidak hanya memberikan penjelasan tentang faktor internal terkait gesekan di Iran, tetapi juga faktor eksternal yang mendistorsi informasi valid sehingga menyebabkan *clash* di tubuh masyarakat Iran.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan menganalisis data-data dari berbagai literatur, baik dari buku, artikel jurnal, sumber-sumber berita, dan juga video. Data primer dalam penelitian ini adalah sebuah

penelitian yang ditulis oleh Elaheh Koolaee yang berjudul *Iranian women from private sphere to public sphere, with focus on parliament*¹⁰. Dalam penelitian ini secara ringkas membahas tentang sejarah panjang dan peran perempuan Iran dalam proses demokratisasi di negeri para mullah tersebut. Bagaimana hak-hak perempuan Iran di ruang publik terjamin sehingga memiliki perlindungan hukum yang sangat baik atas tuntutan mereka untuk mengubah hukum perdata.

Dalam penelitian ini menyentuh beberapa aspek yang tidak tersentuh dalam penelitian sebelumnya. Bahwa isu jilbab di Iran tidak sekedar diperjuangkan untuk pembebasan, tetapi menjadi isu politik yang seakan menggambarkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan Islam di Iran.

Membaca Konstitusi Iran; Demokrasi Islam?

Pasca revolusi 1979, setelah lepas dari tirani rezim Shah Pahlevi, Republik Iran secara bertahap bertransformasi menjadi negara yang demokratis. Terbentuknya sistem demokrasi di Iran ditandai dengan dibukanya ruang partisipasi rakyat dalam menentukan dan memilih presiden dan wakil mereka di parlemen. Presiden dan parlemen (*Majelis Syura-e Islami*) dipilih langsung secara jujur dan terbuka melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) dan dilakukan secara berkala. Tidak hanya itu, anggota di

¹⁰ Elaheh Koolaee, "Iranian Women from Private Sphere to Public Sphere, with Focus on Parliament," *Iran and the Caucasus* 13, no.

2 (2009): 401-14, <https://doi.org/10.1163/157338410X12625876281587>.

lembaga politik lainnya seperti anggota Majelis Ahli (*Majelis-e Khubregan*), Dewan Perwalian (*Shuraye-Nigahban*) juga dipilih langsung oleh rakyat¹¹.

Partisipasi rakyat dalam proses politik di Iran mengindikasikan bahwa demokrasi Iran hidup dan tumbuh lebih baik dari negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Indikator lainnya ialah adanya pembatasan masa jabatan presiden dan anggota parlemen di Iran, sehingga pergantian pemangku kebijakan terjadi secara periodik. Hal ini berbeda dan tidak terjadi di beberapa negara Arab di Timur Tengah, seperti di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara kerajaan di Arab Teluk lainnya.

Demokrasi Iran terbilang unik dan patut mendapat apresiasi. Sejak lepas dari jeratan rezim Shah Pahlevi, Iran meramu demokrasi sesuai dengan kultur budaya dan keagamaan rakyat Iran, namun tidak terjebak dalam jeratan wacana primordial dan konflik sektarian Sunni-Syi'ah. Pun juga demokrasi Iran berbeda dengan demokrasi liberal ala Barat, di mana kekuasaan mutlak ada di tangan rakyat. Iran mengembangkan demokrasi Islami (*islamic democracy*), di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan kaum ulama yang dikenal dengan *walî faqîh*. Demokrasi yang berkembang di Iran bukan berdasar

pada kedaulatan rakyat secara penuh, melainkan kedaulatan rakyat yang tunduk pada hukum Tuhan melalui para *fuqaha* (para ahli hukum). Kedaulatan rakyat yang dibimbing dan diarahkan oleh ahli agama¹²

Walî faqîh mempunyai otoritas untuk menentukan arah politik dan pemerintahan di Iran. Bahkan calon kepala negara yang akan berkontestasi dalam pemilu adalah calon yang sudah lulus seleksi dan mendapat restu dari *walî faqîh*. Kendati demikian, meski memiliki otoritas istimewa dalam struktur negara *walî faqîh* tidak bisa seenaknya membuat kebijakan. *Walî faqîh* tidak bebas dari kritik dan pengawasan. Adapun yang menjaga *walî faqîh* dari tindakan yang absolut dari penyimpangan, dibentuklah majelis *faqîh* yang terdiri dari para *marjâ' al-taqlid* dan *majelis khubregon*, sebuah majelis yang berisi para ulama dan cendekiawan yang bertugas memilih dan mengawasi kinerja dan kebijakan *walî faqîh*¹³.

Sistem politik Iran adalah kombinasi dari berbagai jenis sistem politik, terutama kombinasi dari demokrasi dan teokrasi, dan tentu saja dalam kasus tertentu sangat berbeda dengan kedua model

¹¹ Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2007), 245.

¹² John L. Esposito and John O Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem Dan Tantangan* (Bandung: Mizan, 1999), 81.

¹³ Khalid Al-Walid, "Wilayatul Faqih: Konsep Pemerintahan Teodemokrasi," *Jurnal*

Review Politik 3, no. 1 (2013); Ainur Rofiq Al-Amin, "Demokrasi Perperspektif Hizbut Tahrir Versus Religious Mardomsalari Ala Muslim Iran," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2013): 2013, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23956527/>.

tersebut¹⁴. Model demokrasi ini tidak ditemukan di negara lain, baik itu di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Jordania, Maroko, Kuwait dan lainnya, maupun di negara-negara Barat, mulai Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan lainnya. Dalam praktiknya, sebagaimana dalam sistem demokrasi konsep *trias politica* juga berjalan di Iran dan mekanisme pergantian tiga lembaga penting negara tersebut melibatkan partisipasi rakyat yang diserap melalui jalur pemilu.

Demokrasi yang berkembang di Iran menjadi referensi penting bahwa sistem demokrasi yang berlaku tidak boleh “dipaksakan” hanya satu model, sebagaimana dikenalkan oleh Barat. Demokrasi harus hadir dan berkembang dengan ciri khasnya sendiri sesuai dengan sistem nilai dan budaya masyarakat di setiap negara. Hal itu karena budaya dan sistem nilai masyarakat Barat berbeda dengan sistem nilai yang dianut masyarakat Timur. Dan, sebagaimana mafhum bahwa Barat sendiri dengan studi *orientalisme* menjadikan perbedaan nilai itu sebagai wacana politik untuk membelah masyarakat dunia menjadi kelas-kelas sosial yang hirarkis-dikotomis. Kemudian konstruksi pemikiran manusia dibentuk dalam oposisi *binner* yang saling menegasi, bahwa Barat “berbeda” dengan Timur¹⁵.

¹⁴ Al-Amin, “Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir Versus Religious Mardomsalari Ala Muslim Iran.”

¹⁵ Mas’odi, “White Supremacy , Discourse Violence , and Injustice : Double Standard Political Analysis of the Western World in Conflict Palestine and Ukraine,” *Al-Irfan*:

Apakah demokrasi Islam ala Iran merupakan demokrasi yang sempurna? Dalam tataran praksis tidak ada sistem pemerintahan yang tampak sempurna dan memuaskan semua pihak, termasuk demokrasi di Iran. Demokrasi Islam Iran juga masih *debatable*, sebagaimana konsep dan jenis demokrasi yang berkembang di negara-negara lain. Dan faktanya, meski Iran merupakan negara republik dan menjalankan pemilu disetiap pergantian kekuasaan, berdasarkan data indeks demokrasi Iran tercatat dalam barisan negara-negara otoriter.

Dalam laporan *Economist Unit Index* di tahun 2020 Iran masuk dalam kategori rezim otoritarian (*authoritarian regimes*) dan menduduki posisi 152, satu angka di bawah Tiongkok¹⁶. Posisi Iran bahkan berada di bawah beberapa negara Arab Teluk yang mayoritas menerapkan sistem monarkhi, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Kuwait. Selintas data ini absurd dan membingungkan di mana negara republik yang menerapkan demokrasi indeks demokrasi berada di bawah negara-negara Monarkhi.

Sebab itu, tidak aneh jika demokratisasi di Iran sejauh ini tidak merubah persepsi negatif Barat terhadap negara para Mullah tersebut. Bahwa Iran merupakan negara otoriter dan anti demokrasi.

Journal of Arabic Literature and Islamic Studies 5, no. 2 (2022): 6-9.

¹⁶ Economist Unit Index, “Indeks Demokrasi,” 2020, https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Demokrasi.

Bagi Barat negara paling demokratis di Timur Tengah adalah Israel, sekutu dekatnya yang rekam jejaknya kerap menganggangi nilai-nilai demokrasi, yaitu pelanggaran HAM berat terhadap bangsa Palestina. Padahal demokrasi Israel hanya berlaku dan dipraktikkan terhadap bangsanya sendiri, dan melakukan praktik otoritarian terhadap bangsa lain, bangsa Palestina.

Kurang lebih empat dekade pasca revolusi Amerika dan negara-negara Barat menjadikan Iran sebagai musuh bersama. Bahkan tahun 2002 presiden Amerika Georgh W Bush memasukkan Iran sebagai “poros kejahatan” – membersamai Irak dan Korea Utara— atas dasar tuduhan Iran mengembangkan dan mengoprasikan senjata nuklir. Amerika menyatakan bahwa negaranya dan negara-negara yang menjadi sahabatnya untuk mengembargo Iran dengan tidak mengambil minyak dari Iran, pemutusan hubungan diplomatik seperti melarang hubungan dagang dengan Iran¹⁷.

Untuk menumbangkan rezim Iran Amerika tidak hanya mengembargo dan mengisolasi Iran dari dunia luar, namun juga kerap melakukan sabotase dengan menunggangi berbagai aksi gerakan massa di Iran. Tidak hanya terkait isu Mahsa Amini, namun operasi sabotase itu sudah beberapa kali

terjadi jauh sebelum meninggalnya perempuan Kurdi tersebut. Ketika pemerintahan Bush, misalnya, Amerika diam-diam telah menyediakan anggaran sekitar 4,5 juta dolar AS untuk membantu kaum oposisi dan pro-demokrasi Iran guna menumbangkan pemerintahan Republik Islam¹⁸. Hal yang sama juga dilakukan dan diakui Amerika dalam demonstrasi tahun 2018 silam¹⁹.

Kelompok oposan tersebut diberi tugas mengumpulkan data pelanggaran HAM di Iran, yang mana data itu digunakan Amerika untuk menguatkan narasi bahwa Iran anti demokasi. Namun akhirnya upaya Amerika itu gagal untuk kesekian kalinya. Iran tetap kuat dan pantang tunduk pada Amerika dan sekutu Baratnya.

Gerakan Massa dan Ruang Publik Inklusif

Apa yang menggagalkan upaya Amerika dan negara-negara Barat untuk menumbangkan rezim Iran? Tentu banyak faktor yang membuat Republik Islam Iran terus bertahan. Sebagaimana disampaikan Valiollah Mohammadi, mantan Duta Besar Iran untuk Indonesia, bahwa sedikitnya ada tiga faktor yang membuat Iran bisa bertahan. *Pertama*, Iran mendapat dukungan penuh dari masyarakatnya; *kedua*, Iran tetap menjaga hubungan baik dengan

¹⁷ Tiara Angelia, “Konflik Amerika Serikat Dan Iran Studi Kasus: Keluarnya Amerika Serikat Dari Perjanjian JCPOA,” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 1 (2021): 103–10.

¹⁸ Riza Sihbudi, “Iran, AS, Dan Demokrasi,” *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*,

2007, <http://lipi.go.id/berita/iran-as-dan-demokrasi/450>.

¹⁹ Muthiah Alhasany, “Amerika Serikat Gagal Mengguncang Iran,” *Kompasina*, 2018, <https://www.kompasiana.com/empuratu/5a574515cbe5233e5b2dc8c2/amerika-serikat-gagal-mengguncang-iran>.

negara-negara lain di dunia; dan ketiga, Iran mampu meningkatkan produksi dalam negeri²⁰. Beberapa kebutuhan dalam negeri dapat diproduksi Iran secara mandiri di antaranya obat-obatan hingga suku cadang alutsista.

Melihat dinamika internal Iran, dari tiga faktor di atas, faktor pertama merupakan basis struktur kekuatan Iran dalam menghadapi berbagai tekanan selama ini, baik dari luar maupun dalam. Sebagaimana mafhum bahwa Iran merupakan salah satu negara Timur Tengah yang sering dilanda gerakan demonstrasi. Pemandangan itu semakin biasa dan sering tampak di ruang publik setelah Iran lepas dari penguasa tiran dinasti Reza Pahlevi, di mana kebebasan menyampaikan aspirasi dijamin oleh konstitusi.

Lengsernya dinasti Pahlevi menjadi sejarah penting betapa kekuatan massa bisa menumbangkan rezim yang telah berkuasa lebih 50 tahun tersebut. Uniknyanya, gerakan massa di Iran tidak seperti umumnya terjadi di negara-negara lain. Setiap ada demonstrasi yang mengkritik pemerintah, selalu ada demonstrasi tandingan yang mendukung pemerintah Iran, dan umumnya dengan jumlah massa yang lebih besar.

Pada tahun 1999, misalnya, terjadi gerakan mahasiswa yang cukup besar di Iran. Dalam gerakan tersebut ada puluhan ribu mahasiswa

yang terlibat aksi dalam rangka mendukung sang presiden, Mohammad Khatami. Unjuk rasa mahasiswa ini dipandang sebagai terbesar sejak Revolusi Islam (Februari 1979) yang dipimpin Imam²¹.

Selain itu, demonstrasi tahun 2018 silam untuk mendukung presiden Hassan Rouhani, yang merupakan demonstrasi tandingan atas gelombang demonstrasi yang sebelumnya dilakukan oleh kelompok anti-pemerintah. Menanggapi demonstrasi tandingan tersebut Ramin Mosgtagim, koresponden *LA Times* Teheran mengatakan "Setiap kali kami mengalami demonstrasi atau kerusuhan, pasti selalu ada perlawanan dari institusi pro-pemerintah.... Pemerintah memiliki para pendukung, jadi tidak mengejutkan jika mereka berdiri kukuh dan memperoleh dukungan pada saat seperti ini"²².

Dukungan rakyat untuk pemerintah Iran juga terlihat dalam demonstrasi tandingan merespon gerakan massa yang sebelumnya turun ke jalan atas kematian Mahsa Amini. Demonstrasi tersebut digelar serentak pada Jum'at (23/09/23) di beberapa kota dengan jumlah massa ditengarai lebih besar dari pada kelompok massa anti-pemerintah yang turun ke jalan. Merespon demonstrasi tandingan tersebut presiden Iran, Ibrahim Raisi

²⁰ Suci Sekarwati, "Ini 3 Cara Iran Bertahan Dari Embargo Puluhan Tahun," *Tempo*, 2019, <https://dunia.tempo.co/read/1172865/ini-3-cara-iran-bertahan-dari-embargo-puluhan-tahun>.

²¹ Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, 260.

²² Sindonews, "Pendukung Pemerintah Menggelar Demo Tandingan," *Koran Sindo*, 2018, <https://international.sindonews.com/berita/1270908/43/pendukung-pemerintah-iran-gelar-demo-tandingan>.

mengatakan bahwa kehadiran rakyat dalam aksi tersebut adalah kekuatan dan kehormatan Republik Islam²³.

Meski demonstrasi tandingan diikuti oleh massa yang lebih besar seolah tidak penting bagi media-media mainstream dunia Barat. Pemberitaan yang memenuhi media massa hanya menyoroti demonstrasi anti-pemerintah, dan diakumulasi sebagai bentuk kemarahan dan kekecewaan mayoritas rakyat Iran atas pemerintah Republik Islam Iran. Tidak ketinggalan para pejabat tinggi Amerika dan Barat ramai-ramai mengutuk Iran, seraya mengulang-ulang narasi streatip klasik bahwa Iran anti demokrasi, negara teroris dan lain-lain.

Fakta di lapangan berbeda di mana narasi-narasi tersebut bertolak belakang dengan kehidupan rakyat Iran yang terbiasa melakukan aksi demonstrasi di jalanan. Hal itu menunjukkan realitas ruang publik Iran yang inklusif, tidak anti kritik. Menyampaikan kritik di ruang publik dijamin oleh konstitusi Iran selagi tidak menciptakan kekacauan. Pemerintah Iran menjamin keterbukaan ruang publik bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Meski demikian patut diakui dinamika di lapangan tidak bisa dipastikan bahwa aksi demonstrasi akan berakhir damai atau akan jatuh korban.

Perempuan Iran di Ruang Publik

Meninggalnya Mahsa Amini mengangkat isu perempuan muncul

kepermukaan dan menjadi topik utama dalam berbagai aksi demonstrasi di Iran beberapa bulan terkahir. Mulai dari jilbab, kesetaraan, hingga kebebasan perempuan di ruang publik. Beberapa aktivis dan sleberiti ikut memobilisasi massa untuk menentang kewajiban berjilbab di Iran. Misalnya, dua selebriti tekemuka Hengameh Ghaziani dan Katayoun Riahi yang keduanya cukup vocal mengkritisi pemerintah Iran dan menggunakan media sosial mereka untuk mengempanyekan anti jilbab. Tidak hanya vocal mengenai kewajiban jilbab, di salah satu postingannya Ghaziani bahkan menuduh pemerintah Iran sebagai pembunuh anak-anak.

Kampanye anti jilbab tidak hanya muncul dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Masih Alinejad, misalnya, aktivis feminis sekaligus jurnalis kelahiran Iran yang kini menetap di Amerika juga melakukan kampanye anti jilbab sejak tahun 2017 silam.

Pendiri *My Stealthy Freedom* tersebut mengempanyekan lepas jilbab lewat media sosial, dan cukup banyak mendapat respon dan dukungan dari rakyat anti-pemerintah Iran. Dengan menggunakan tagar *#whitewednesdays*, para netizen mengunggah berbagai photo dan video mereka yang mengenakan jilbab berwarna putih atau pakaian serba putih sebagai ungkapan protes

²³ Dwina Agustin, "Massa Pro Pemerintah Iran Gelar Aksi Tandingan: Pelanggar Alquran Harus Dieksekusi," *Republika*, September 24, 2022,

<https://www.republika.co.id/berita/rip0gm320/massa-pro-pemerintah-iran-gelar-aksi-tandingan-pelanggar-alquran-harus-dieksekusi>.

²⁴. Hingga kini Masih Alinejad tetap vocal mengkritik rezim Iran. Melalui akun twitter pribadinya dia semakin keras melayangkan kritik merespon meningginya Mahsa Amini.

Selain itu, Barat khususnya Amerika turut ambil momentum untuk menekan dan mengecam pemerintah Iran atas peristiwa tersebut. Secara khusus Gedung putih menyatakan bahwa kematian Amini adalah pelanggaran HAM. Tidak sebatas mengecam, gedung putih kemudian "memaksa" Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan resolusi yang isinya mengeluarkan Republik Islam Iran dari keanggotaan Badan Hak-Hak Perempuan (UNCSW). Bunyi teks resolusi itu sebagai berikut:

Pemerintah Iran terus melemahkan dan semakin menindas hak asasi perempuan dan anak perempuan, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, sering kali dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan... serta melalui penggunaan kekuatan mematikan yang mengakibatkan kematian para pengunjuk rasa damai, termasuk perempuan dan anak-anak ²⁵.

Menanggapi resolusi tersebut Dubes Iran untuk Indonesia, Mohammad Azad, mengatakan bahwa resolusi tersebut keliru dan bertentangan dengan semangat piagam PBB. Azad mengaggap resolusi itu dibuat berdasarkan klaim tak berdasar dan argument palsu

yang dikarang oleh Amerika. Hal itu dilakukan untuk menekan Iran dalam skala global dan mendukung kerusuhan terus terjadi di Iran. Resolusi tersebut dianggap bentuk campurtangan Amerika dan Barat dalam urusan dalam negeri Iran, bersekutu dengan kelompok anti-Iran yang ada di luar negeri.

Jika bunyi resolusi itu keliru dan palsu, bagaimana fakta riil di lapangan terkait partisipasi perempuan di ruang publik? Dalam konteks ini, Azad menegaskan bahwa Iran pasca revolusi sudah melahirkan kemajuan-kemajuan bagi kaum perempuan. Dalam keterangannya ia menegaskan bahwa,

Selama 40 tahun setelah pendirian Republik Islam Iran, kami telah membuat prestasi besar di bidang kemajuan perempuan, dan jelas bahwa perempuan Iran akan melanjutkan jalan kemajuan dan pembangunan mereka berdasarkan nilai-nilai budaya dan peradaban kami ²⁶.

Faktanya memang demikian, dimana penghargaan terhadap kaum perempuan merupakan salah satu poin penting dari jalan demokrasi yang dipilih Iran pasca revolusi 1979. Sang pemimpin revolusi, Imam Khomeini, menegaskan perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki: hak pendidikan, hak bekerja, hak bersuara dan hak untuk dipilih. Dalam segala hal dimana pria

²⁴ BBC, "Masih Alinejad, Perempuan Iran Penggagas Gerakan Lepas Hijab," BBC News, 2017, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40284220>.

²⁵ Deutsche Welle, "PBB Keluarkan Iran Dari Badan Hak-Hak Perempuan," detiknews, 2022, <https://news.detik.com/dw/d->

6463009/pbb-keluarkan-iran-dari-badan-hak-hak-perempuan.

²⁶ Wahananews, "Tanggapan Kedubes Usai PBB Depak Iran Dari Badan Hak-Hak Perempuan," Wahana News, 2022, <https://wahananews.co/internasional/tanggapan-kedubes-usai-pbb-depak-iran-dari-badan-hak-hak-perempuan-qjw1Jnape7/0>.

mempunyai hak, maka perempuan pun sama memiliki haknya²⁷. Penghargaan tersebut diberikan atas partisipasi kaum perempuan dalam melakukan gerakan sosial untuk menumbangkan rezim Pahlevi.

Prinsip penegakan hak dan keadilan untuk kaum perempuan tidak sekedar wacana politik para elit Iran, namun menjadi hukum positif yang dijamin oleh konstitusi Iran. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar/Konstitusi Republik Islam Iran disebutkan secara jelas kewajiban pemerintah untuk memperhatikan hak-hak perempuan. Pasal 20, misalnya, berisi tentang kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek. Berikut bunyi pasalnya, "Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, secara setara menerima perlindungan hukum dan memiliki semua hak kemanusiaan, politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang sesuai dengan kriteria Islam"²⁸.

Selanjutnya, Pasal 21 secara spesifik menuntut pemerintah menjamin hak kaum perempuan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, dan mewujudkan tujuan-tujuan berikut:

Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan kepribadian perempuan dan pengembalian hak-hak mereka, baik materiil maupun intelektual;

Perlindungan terhadap para ibu, terutama pada masa kehamilan

dan pengasuhan anak, dan perlindungan terhadap anak-anak yatim;

Membentuk pengadilan yang berkompeten untuk melindungi keluarga;

Menyediakan asuransi khusus untuk janda, perempuan tua, dan perempuan tanpa pelindung;

Memberikan hak pengasuhan kepada ibu angkat untuk melindungi kepentingan anak ketika tidak ada pelindung legal²⁹.

Dua pasal di atas menunjukkan bahwa konstitusi Iran mempunyai perhatian khusus terhadap kaum perempuan. Bahwa kaum perempuan harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh negara, sebagaimana kaum laki-laki. Hal ini berbeda dengan kondisi Iran sebelum revolusi, dimana kaum perempuan dianggap sebagai manusia kelas dua dan sebatas "alat" reproduksi. Kaum perempuan hanya mempunyai tugas di sektor domestik, dan tidak memiliki peran fundamental di ruang publik.

Pasca revolusi Imam Khomeini menghapus semua stigma negatif terhadap kaum perempuan tersebut. Sang Imam memosisikan kaum perempuan sama terhormatnya dengan kaum laki-laki. Bahkan dalam salah satu pidatonya ia menyampaikan, bahwa Islam tidak

²⁷ Kiki Mikail, "POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan Di Iran Pasca Revolusi Islam 1979," *Addin* 9, no. 2 (2015): 253-76, <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.615>.

²⁸ Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020).

²⁹ *Ibid.*, 162-63.

menghendaki perempuan jadi barang mainan bagi kaum laki-laki³⁰.

Amanah UUD itu dijalankan dengan baik oleh pemerintah Iran. Negara tidak menghambat partisipasi kaum perempuan untuk mengisi pos-pos penting di ruang publik, mulai dari kursi pemerintahan, parlemen, kehakiman, dunia Pendidikan, bisnis, dan lainnya. Meski sempat dilarang dan penuh dinamika di awal pasca revolusi, kaum perempuan akhirnya bisa menduduki jabatan-jabatan penting di ruang publik. Sejarah mencatat nama Masoume Ebtekar yang berhasil terpilih sebagai Wakil Presiden perempuan pertama di Republik Islam Iran pada masa Presiden Khatami tahun 1997. Ia merupakan representasi dari politisi perempuan Iran yang aktif turun ke jalan sejak dari bangku kuliah, dan turut menjadi aktor sukseksi revolusi.

Tidak hanya itu, data partisipasi perempuan Iran di ruang publik terus menunjukkan tren positif selama kurang lebih empat dekade terakhir pasca revolusi. Dalam bidang Pendidikan, jumlah perempuan Iran yang berpendidikan menyentuh angka 4,2 kali selama 43 tahun terakhir. Dalam dua dekade terakhir jumlah mahasiswa perempuan lebih banyak dari mahasiswa laki-laki di berbagai universitas Iran. Ada sekitar 27% perempuan Iran yang sudah menamatkan jenjang S1 dan S2. Selain itu, angka perempuan Iran

yang berprofesi dosen terus meningkat dari 3.508 perempuan tahun 1997 menjadi 20.298 tahun 2018.

Saat ini terdapat 17 perwakilan perempuan di parlemen. Begitu juga di bidang manajemen makro, sejauh ini ada empat duta besar perempuan, lima gubernur, lima wali kota, dua wakil presiden, sejumlah penasihat presiden, 24 wali kota perkotaan, dan 2490 kepala desa perempuan di Iran³¹. Di bidang lain, pencapaian dan kemajuan perempuan Iran juga terus meningkat, seperti bidang ekonomi, budaya, seni, dan juga olahraga.

Meski demikian, pencapaian tersebut tidak pernah disinggung kelompok anti-pemerintah dalam setiap demonstrasi. Massa anti-pemerintah selalu mengangkat kewajiban jilbab sebagai sampel untuk menuduh pemerintah mengekang kebebasan perempuan. Amerika kemudian turut melakukan simplifikasi dan menjadikan narasi tersebut seakan bentuk penolakan dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem Islam di Iran. Isu jilbab sering dicampuradukan dengan isu ekonomi dan selalu muncul dalam setiap demonstrasi anti-pemerintah di Iran.

Pertanyaannya kemudian, apakah kewajiban berjilbab menghalangi kaum perempuan mengakses pendidikan, ekonomi, politik, dan lainnya? Tentu tidak. Semakin tingginya pengentasan buta aksara di Iran pasca revolusi,

³⁰ Mikail, "POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan Di Iran Pasca Revolusi Islam 1979."

³¹ Bitu Zolali, "Peran Wanita Di Republik Islam Iran," *alinea.id*, 2022, <https://www.alinea.id/kolom/peran-wanita-di-republik-islam-iran-b2feZ9Bxw>.

misalnya, tidak ada hubungannya dengan perempuan berjilbab atau tidak. Kebijakan wajib jilbab tidak boleh dilihat secara terpisah dengan perundang-undangan yang memberi perlindungan terhadap hak-hak perempuan secara umum, sebagaimana pasal 20 dan 21 di atas.

Fakta itu tidak pernah diindahkan oleh Barat selama ini, khususnya Amerika. Barat sering melakukan standar ganda dan tidak konsisten dalam menggunakan barometer demokrasi. Sebagai contoh, bahwa ketika digelar demonstrasi oleh massa anti-pemerintah di Iran, selalu ada demonstrasi tandingan dengan massa yang lebih besar mendukung pemerintah Iran. Dari fakta itu, kalau demokrasi diukur berdasarkan suara mayoritas, seharusnya Amerika konsisten dan mengakui bahwa Iran telah memenuhi kriteria itu.

Sebagai kampium demokrasi, Amerika seharusnya bijak dan adil dalam mengambil sikap politik, khususnya dalam memberlakukan sanksi-sanksi³². Kalau Iran harus disanksi dan dimusuhi karena mewajibkan jilbab, Amerika juga tidak boleh mentolerir Arab Saudi karena memberlakukan kebijakan yang sama. Bahkan dalam banyak aspek, aturan diskriminatif untuk perempuan Saudi lebih banyak dari Iran. Di Republik Islam Iran tidak ada larangan menyetir kendaraan sendiri bagi kaum perempuan, sedangkan negara monarki itu sudah lama memberlakukan kebijakan diskriminatif tersebut.

Apa respon Amerika mengenai kehidupan perempuan Saudi selama ini? Tidak ada. Amerika sebagai institusi negara tidak memprotes Saudi. Amerika malah begitu mesra dengan negara monarkhi tersebut. Bahkan Amerika mendukung Saudi melakukan pembantaian di Yaman sejak 2015 silam, sebuah kejahatan yang jelas melanggar HAM.

Penutup

Kebijakan wajib berjilbab di Iran sudah menjadi hukum positif dan diatur dalam konstitusi. Karena sudah menjadi aturan resmi tentu ada konsekuensi logis bagi siapa saja yang melanggarnya. Namun kebijakan tersebut tidak boleh dilihat secara terpisah dengan perundang-undangan yang memberi perlindungan terhadap hak-hak perempuan secara umum. Konstitusi Iran telah mengatur kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan secara ideal. Kewajiban jilbab tidak membatasi perempuan Iran untuk melakukan aktivitas di ruang publik. Pendiri Republik Islam Iran, Ayatullah Khomeini, telah memberi jalan bagi kaum perempuan untuk bisa mengakses Pendidikan, aktif di dunia politik, ekonomi, budaya, dan lainnya. Kondisi ini berbeda dengan masa dinasti Pahlevi, di mana kaum perempuan menjadi masyarakat kelas dua.

Ketidakpuasan atas kebijakan wajib berjilbab tentu ada. Hal itu terlihat dalam bebepa aksi demonstrasi disuarakan oleh massa anti-pemerintah. Bahwa kewajiban

³² Mas'odi, "White Supremacy , Discourse Violence , and Injustice: Double Standard

Political Analysis of the Western World in Conflict Palestine and Ukraine."

berjilbab dianggap diskriminatif dan melanggar HAM. Isu jilbab semakin mengemuka setelah peristiwa kematian Mahsa Amini, seorang pemuda Iran dari suku Kurdi. Kematian Amini memantik kecaman dunia internasional terhadap republik Iran. Barat dan Amerika ramai-ramai mengisolasi Iran dengan menambah sanksi baru. Yang penting dicermati bahwa isolasi dan sanksi itu kontra produktif dengan azas demokrasi yang Barat perjuangkan. Sanksi-sanksi merupakan pelanggaran HAM yang nyata bagi rakyat Iran, tidak terkecuali para perempuan Iran.

Daftar Pustaka

- Agustin, Dwina. "Massa Pro Pemerintah Iran Gelar Aksi Tandingan: Pelanggar Alquran Harus Dieksekusi." *Republika*, September 24, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/rip0gm320/massa-pro-pemerintah-iran-gelar-aksi-tandingan-pelanggar-alquran-harus-dieksekusi>.
- Al-Amin, Ainur Rofiq. "Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir Versus Religious Mardomsalari Ala Muslim Iran." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2013): 2013. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23956527/>.
- Al-Walid, Khalid. "Wilayatul Faqih: Konsep Pemerintahan Teodemokrasi." *Jurnal Review Politik* 3, no. 1 (2013).
- Alfons, Matius. "Demo Kenaikan Harga BBM Masih Terjadi Di Iran, Pedemo Jarah Toko." *Detik News*, 2019. <https://news.detik.com/internasional/d-4789694/demo-kenaikan-harga-bbm-masih-terjadi-di-iran-pedemo-jarah-toko>.
- Alhasany, Muthiah. "Amerika Serikat Gagal Mengguncang Iran." *Kompasiana*, 2018. <https://www.kompasiana.com/empuratu/5a574515cbe5233e5b2dc8c2/amerika-serikat-gagal-mengguncang-iran>.
- Angelia, Tiara. "Konflik Amerika Serikat Dan Iran Studi Kasus: Keluarnya Amerika Serikat Dari Perjanjian JCPOA." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 1 (2021): 103-10.
- BBC. "Masih Alinejad, Perempuan Iran Penggagas Gerakan Lepas Hijab." *BBC News*, 2017. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40284220>.
- Berlianto. "Buntut Kematian Mahsa Amini, AS Sanksi Polisi Moral Iran." *Sindonews.Com*, 2022. <https://international.sindonews.com/read/892877/42/buntut-kematian-mahsa-amini-as-sanksi-polisi-moral-iran-1663898970>.
- Chriastuti, Novi. "Geger Kematian Mahsa Amini, Ini Kata Kedubes Iran Soal Penyebabnya." *Detik News*, 2022. <https://news.detik.com/internasional/d-6357773/geger-kematian-mahsa-amini-ini-kata-kedubes-iran-soal-penyebabnya>.
- Economist Unit Index. "Indeks Demokrasi," 2020. https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Demokrasi.
- Esposito, John L., and John O Voll. *Demokrasi Di Negara-Negara*

- Muslim: Problem Dan Tantangan*. Bandung: Mizan, 1999.
- Gergez, Fawaz A. *Amerika Dan Islam Politik: Benturan Peradaban Atau Benturan Kepentingan?* Translated by Kili Pringgodigdo and Hamid Basyaib. Jakarta: AlvaBet, 2002.
- Hakim, Ikhsan Abdul. "Penasihat Biden: Kami Tak Terkejut Gelombang Kerusakan Melanda Iran, Kebijakannya Tak Sesuai HAM." *Kompas*, 2022. <https://www.kompas.tv/article/330706/penasihat-biden-kami-tak-terkejut-gelombang-kerusakan-melanda-iran-kebijakannya-tak-sesuai-ham>.
- Koolae, Elaheh. "Iranian Women from Private Sphere to Public Sphere, with Focus on Parliament." *Iran and the Caucasus* 13, no. 2 (2009): 401-14. <https://doi.org/10.1163/157338410X12625876281587>.
- Mas'odi. "Epistemologi Falsifikasionisme Popper Dan Mitos Universalisme Barat: Menyoal Proyek Demokratisasi AS Di Dunia Arab." In *International Confrence on Islamic Studies*, 243, 2022. <https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/icois/article/view/74>.
- — —. "White Supremacy , Discourse Violence , and Injustice : Double Standard Political Analysis of the Western World in Conflict Palestine and Ukraine." *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies* 5, no. 2 (2022): 6-9.
- Mikail, Kiki. "POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan Di Iran Pasca Revolusi Islam 1979." *Addin* 9, no. 2 (2015): 253-76. <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.615>.
- Muhammad, Mahdi. "Unjuk Rasa Pro-Pemerintah Tandingi Demonstrasi Dukung Mahsa Amini." *Kompas*, 2022. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/09/23/teheran-ambigu-hadapi-para-demonstran>.
- Reuters. "Protests Flare across Iran in Violent Unrest over Woman's Death," 2022. <https://www.reuters.com/world/middle-east/tehran-governor-accuses-protesters-attacks-least-22-arrested-2022-09-20/>.
- Sahara TV. "Pidato Panas Presiden Iran Di Hadapan Mahasiswa Universitas Teheran," 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=csLqBfjURqc>.
- Sekarwati, Suci. "Ini 3 Cara Iran Bertahan Dari Embargo Puluhan Tahun." *Tempo*, 2019. <https://dunia.tempo.co/read/172865/ini-3-cara-iran-bertahan-dari-embargo-puluhan-tahun>.
- Sihbudi, Riza. "Iran, AS, Dan Demokrasi." *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*, 2007. <http://lipi.go.id/berita/iran-as-dan-demokrasi/450>.
- — —. *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta: Penerbit Mizan, 2007.
- Sindonews. "Pendukung Pemerintah Menggelar Demo Tandingan." *Koran Sindo*, 2018. <https://international.sindonews.com/berita/1270908/43/pendukung-pemerintah-iran-gelar>

- demo-tandingan.
- Suryawati, Nany. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Wahananews. "Tanggapan Kedubes Usai PBB Depak Iran Dari Badan Hak-Hak Perempuan." Wahana News, 2022. <https://wahananews.co/internasional/tanggapan-kedubes-usai-pbb-depak-iran-dari-badan-hak-hak-perempuan-qjw1Jnape7/0>.
- Welle, Deutsche. "PBB Keluarkan Iran Dari Badan Hak-Hak Perempuan." detiknews, 2022. <https://news.detik.com/dw/d-6463009/pbb-keluarkan-iran-dari-badan-hak-hak-perempuan>.
- Zolali, Bitu. "Peran Wanita Di Republik Islam Iran." alinea.id, 2022. <https://www.alinea.id/kolom/peran-wanita-di-republik-islam-iran-b2feZ9Bxw>.